

IRONI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL : Kuantitas yang Tak Meningkatkan Kualitas

👤 Amanda K. Wardhani 📅 Jum'at, 05/01/2018 02:00 WIB



Ada kabar menggembirakan tentang perkembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Menurut The Global Human Capital Report 2017, Indonesia berada di urutan ke-65 di dunia untuk urusan kualitas sumber daya manusia.

Dalam laporan yang dirilis Bank Dunia pada pertengahan September tahun lalu, peringkat Indonesia meningkat dari posisi ke-69 pada 2015. Tentunya ini adalah suatu prestasi di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional ke depan.

Namun, jangan senang dulu. Mari tengok negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang berhasil melakukan lompatan dalam pengembangan SDM dalam 3 tahun terakhir.

Mengacu pada laporan yang sama, Thailand menduduki peringkat ke-57 pada 2015 dan naik ke level 40 terbaik di dunia pada tahun lalu. Lihat juga geliat Malaysia yang mengerek peringkatnya dari 52 menjadi 33 untuk periode yang sama.

Pada Juni tahun lalu, dunia pendidikan Indonesia juga dihebohkan dengan bertambahnya universitas dalam negeri yang berhasil masuk ke jajaran 500 besar terbaik dunia. Ketiga universitas itu adalah Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada.

Berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh Quacquarelly Symonds (QS) World University Ranking 2017/2018, peringkat UI melesat ke posisi 277 dari sebelumnya 325, lalu ITB naik ke urutan 331, dan UGM berada di peringkat 401 dari sebelumnya yang tidak masuk ke posisi 500 besar.

Apabila dua fakta di atas disandingkan, terlihat bahwa ada permasalahan mendasar di dunia pendidikan Indonesia yang harus segera diperbaiki untuk meningkatkan daya saing di pasar global.

Permasalahan itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, bukan semata-mata memperbanyak jumlah institusi, baik itu dari level dasar hingga perguruan tinggi.



More From Halaman Muka

LIKUIDITAS MELIMPAH : Saatnya Gunakan Momentum

📅 02:00

📄 02:00

BELANJA MODAL 2018 : Ekspansi BUMN Moderat

📅 02:00

📄 02:00

IRONI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL : Kuantitas yang Tak Meningkatkan

PENERIMAAN NEGARA : Lagu Lama Shortfall Pajak

📅 02:00

📄 02:00

Ada fakta ironis yang terekam di dunia pendidikan nasional. Menurut data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikristekdikti), ada sekitar 4.472 perguruan tinggi di dalam negeri.

Jika dirinci, Indonesia memiliki 124 perguruan tinggi negeri (PTN), 3.127 perguruan tinggi swasta (PTS), 175 perguruan tinggi kementerian/lembaga, 968 perguruan tinggi agama swasta, dan 78 perguruan tinggi agama negeri per 11 Maret 2017.

Dari jumlah tersebut, Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) mencatat hanya 1.131 yang terakreditasi dengan rincian 50 PT mempunyai akreditasi A (4%), 345 PT berakreditasi B (31%), dan 736 PT berakreditasi C (65%), dan sisanya 3.340 belum terakreditasi.

Tak hanya itu, jumlah perguruan tinggi dalam negeri tergolong cukup gemuk dibandingkan dengan populasi Indonesia berjumlah 270 juta jiwa.

Hal ini menimbulkan persoalan ketidakefisienan dalam tata kelolanya, yang ditandai dengan angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi yang hanya 45%.

Bandingkan saja dengan China yang memiliki populasi 1,4 miliar jiwa, jumlah perguruan tingginya hanya 2.824 institusi dan memiliki APK lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia.

RENCANA MERGER

Menghadapi situasi ini, sejak tahun lalu Kemendikristekdikti telah mewacanakan penggabungan perguruan tinggi di Indonesia hingga 1.000 unit pada 2019.

Pada tahun ini, Kemendikristekdikti akan fokus menggarap 200 usulan penggabungan perguruan tinggi swasta yang dimiliki oleh yayasan yang sama pada tahun ini.

"Pada tahun pertama ini, kami akan menyelesaikan sekitar 200 usulan penggabungan universitas swasta yang dimiliki oleh satu yayasan karena prosesnya tergolong lebih mudah ketimbang merger dengan yayasan yang berbeda," kata Patdono Suwignjo, Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemendikristekdikti, Kamis (4/1).

Untuk memuluskan rencana tersebut, Kemendikristekdikti menawarkan empat insentif bagi PT yang bersedia melakukan merger. Pertama, penetapan akreditasi PT dengan akreditasi yang berbeda akan dipilih berdasarkan akreditasi yang paling tinggi.

Apabila PT A memiliki akreditasi A melakukan penggabungan dengan PT B yang memiliki akreditasi B, akreditasi PT hasil merger akan mengikuti akreditasi paling tinggi yakni A.

Kedua, persyaratan merger bisa dilakukan oleh PT yang memiliki tanah satu hamparan maupun tidak satu hamparan. Hal ini mengingat banyak PT yang memiliki tanah dengan hamparan yang berbeda.

Ketiga, Kemenristekdikti akan memberikan kelonggaran mengenai jumlah program studi yang harus dimiliki oleh PT hasil merger.

Dia mencontohkan, jika ada rencana merger dua atau lebih sekolah tinggi menjadi universitas, diperbolehkan untuk sementara memiliki jumlah program studi di bawah 10 unit. Idealnya, jumlah program studi dalam satu universitas adalah minimal 10 unit.

Yang tak kalah penting adalah soal pajak. Merger PT akan menggenjot jumlah aset karena pada dasarnya aksi tersebut menggabungkan dua institusi yang berbeda.

Namun, Kemenristekdikti memastikan bahwa merger PT tidak akan dipungut pajak profit karena usaha PT merupakan nonprofit sehingga pengenaan pajaknya harus dibedakan.

"Kan mereka yang digabung itu bersifat nonprofit, jadi akan ada insentif pada saat penggabungan aset. Kami sudah komunikasi dengan Direktorat Jenderal Pajak," tukasnya.

Saat ini, dia mengaku sudah menandatangani 20 PT yang merupakan merger dari sejumlah yayasan pada Desember tahun lalu. "Jika dihitung, ada beberapa yayasan yang memiliki jumlah PT cukup masif di Indonesia antara lain Muhammadiyah, PGRI, dan Universitas Pelita Harapan," tambahnya.

Setelah proses merger PT dengan kepemilikan yayasan yang sama, pihaknya akan mulai menggarap penggabungan PT yang dimiliki yayasan berbeda. Menurutnya, proses merger di ranah ini memang cukup menyita waktu dan upaya karena melibatkan dua institusi yang berbeda.

"Mereka bertemu dulu dan membuat surat perjanjian yang akan diserahkan ke kami. Lalu kami akan mempelajarinya dan memberikan rekomendasinya ke Kementerian Hukum dan HAM untuk membentuk yayasan yang baru. Jika sudah dapat, maka merger PT itu bisa segera diproses dan kami akan mematikan izin PT yang lama," ujarnya.

Dalam proses ini, Patdonno mengungkapkan Kemenristekdikti akan menggunakan jasa penilai untuk menilai 3 aspek mulai dari sisi legal, keuangan, dan akademik. Ketiga aspek tersebut akan digunakan untuk membandingkan kinerja PT sebelumnya dan PT yang sudah digabung.

"itu sudah beberapa kali diwacanakan oleh menteri-menteri terdahulu juga, tetapi tidak pernah terlaksana. Hanya sebatas imbauan dan tidak pernah diberikan insentif," katanya.

Berdasarkan catatannya, sudah ada sekitar 100 PTS yang berminat untuk melakukan merger sejalan dengan himbauan pemerintah. Namun, lanjutnya minat tersebut tidak akan berbuah implementasi jika pemerintah tidak memberikan kemudahan dalam proses penggabungan PT.

Masing-masing institusi pendidikan tinggi, ucapnya, memiliki syarat yang ketat mulai dari jumlah dosen, jumlah aset, hingga jumlah program studi yang harus dimiliki. Namun, dia mengharapkan syarat-syarat tersebut dilonggarkan bagi PTS yang berminat melakukan merger.

"Pembenahan bisa dilakukan sambil berjalan. Lalu, jika proses penggabungan dilakukan dengan skema birokrat yang berbelit, saya yakin tidak ada PTS yang berminat," ujarnya.

Banyaknya jumlah PT di Indonesia diakuinya merupakan buah dari kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Pasalnya, industri pendidikan tinggi saat ini justru membutuhkan moratorium karena APK sangat kecil dibandingkan dengan jumlah PT yang ada.

Kendati menghadapi fakta tersebut, pendirian PT terus dilakukan. "Artinya berebut kue semakin sengit antara perguruan tinggi sehingga jumlah mahasiswa yang didapat berkurang," imbuh Budi.

Jadi, apakah kehadiran institusi pendidikan di negeri ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas? Atau jangan-jangan hanya sekadar komoditas untuk berebut kue populasi besar yang haus akan pendidikan berkualitas.